



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 1
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON 344-9230 (20 SALURAN) PSW. 5204, (021) 3843417, FAKSIMILE (021) 3454640, 3846402
SITUS www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S- 1795 /PB.1/2018 19 Februari 2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penegasan Implementasi Layanan Bersama (*Co-Location*)

Yth. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (terlampir)

Sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Pengelola TRBTKP/CTO Nomor S-3121/SJ/2017 hal Hasil *Leaders' Offsite Meeting* (LOM) Kementerian Keuangan 2017, disampaikan bahwa unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan agar menindaklanjuti arahan Menteri Keuangan dalam LOM, yang salah satu topiknya adalah tindak lanjut implementasi *co-location* DJPb, DJKN, DJPPR, dan Setjen (LPSE).

Berkenaan dengan hal tersebut dan menunjuk KMK Nomor 834/KMK.01/2016 serta berdasarkan hasil rapat pembahasan implementasi layanan bersama (*co-location*) DJPb, DJKN, DJPPR, dan LPSE, dengan ini disampaikan kepada seluruh Kepala Kanwil DJPb yang tercantum dalam KMK Nomor 834/KMK.01/2016, sebagai berikut:

1. Agar terus mengimplementasikan layanan bersama (*co-location*) serta berkoordinasi dengan unit kerja eselon I terkait.
2. Selanjutnya, dalam rangka evaluasi dan untuk mendapatkan masukan terkait penambahan cakupan layanan, diminta agar menyampaikan:
 - a. Laporan implementasi *co-location* (lokasi, cakupan layanan, host layanan, SDM, lokakarya, hak akses HAI DJPb, sarpras, *counter*, laptop, *multiprinter scanner*, sosialisasi/penyampaian informasi ke satker) pada Kanwil maupun pada KPPN lingkup Kanwil (yang tercantum dalam KMK Nomor 834/KMK.01/2016).
 - b. Masukan atas efektivitas implementasi KMK Nomor 834/KMK.01/2016, misalnya: terkait lokasi *co-location*, apakah dikurangi, tetap atau perlu ditambah.
 - c. Usulan gagasan/ide baru mengenai perluasan jenis layanan yang dimungkinkan dalam *co-location*.
 - d. Masukan mengenai materi-materi yang tepat dan dibutuhkan dalam rangka pembuatan sarana atau *tools* pelengkap penunjang CSO *co-location*.
 - e. Laporan, masukan dan usulan sebagaimana pada huruf a, b, c, dan d agar disusun sesuai dengan format terlampir, dan disampaikan ke alamat email: po.otl.perbendaharaan@gmail.com paling lambat tanggal 26 Februari 2018.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal

Haryana
NIP. 196006031985021001

Tembusan:

1. Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara;
2. Sekretaris Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
3. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, DJPPR;
4. Direktur Surat Utang Negara, DJPPR;
5. Kepala Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Setjen Kemenkeu;
6. Para Kepala KPPN (terlampir).

Yth.

1. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh
2. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara
3. Kepala Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta
4. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur
5. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali
6. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan
7. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
8. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi
9. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat
10. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau
11. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau
12. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan
13. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung
14. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu
15. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat
16. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah
17. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan
18. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara
19. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara
20. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah
21. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo
22. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku
23. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat



Daftar Tembusan Para Kepala KPPN:

1. Kepala KPPN Aceh
2. Kepala KPPN Lhokseumawe
3. Kepala KPPN Medan I
4. Kepala KPPN Medan II
5. Kepala KPPN Padang Sidempuan
6. Kepala KPPN Pematang Siantar
7. Kepala KPPN Yogyakarta
8. Kepala KPPN Surabaya I
9. Kepala KPPN Surabaya II
10. Kepala KPPN Malang
11. Kepala KPPN Sidoarjo
12. Kepala KPPN Jember
13. Kepala KPPN Pamekasan
14. Kepala KPPN Madiun
15. Kepala KPPN Denpasar
16. Kepala KPPN Amlapura
17. Kepala KPPN Singaraja
18. Kepala KPPN Makassar I
19. Kepala KPPN Makassar II
20. Kepala KPPN Ternate
21. Kepala KPPN Jambi
22. Kepala KPPN Padang
23. Kepala KPPN Bukittinggi
24. Kepala KPPN Pekanbaru
25. Kepala KPPN Tanjung Pinang
26. Kepala KPPN Batam
27. Kepala KPPN Palembang
28. Kepala KPPN Baturaja
29. Kepala KPPN Lahat
30. Kepala KPPN Bandar Lampung
31. Kepala KPPN Metro
32. Kepala KPPN Bengkulu
33. Kepala KPPN Bandung I
34. Kepala KPPN Bandung II
35. Kepala KPPN Purwakarta
36. Kepala KPPN Cirebon
37. Kepala KPPN Palangkaraya
38. Kepala KPPN Banjarmasin
39. Kepala KPPN Kendari
40. Kepala KPPN Manado
41. Kepala KPPN Palu
42. Kepala KPPN Gorontalo
43. Kepala KPPN Ambon
44. Kepala KPPN Manokwari
45. Kepala KPPN Sorong



LAPORAN IMPLEMENTASI CO-LOCATION
 KANWIL

Lokasi				Jenis layanan yang telah Di implementasi	Sdm (cso co-location)				Sarana & prasarana			Sosialisasi / pemberian Informasi kepada saker (/ sudah belum) / Waktu
TEMPAT (Sesuai KMK 834 Tahun 2016)	Implementasi / efektivitas	Host Co-location	Perlu ditambah / dikurangi / tetap		Berubah/ tidak	Nama/ Nip / Bidang/ Seksi	Pernah mengikuti diklat / belum	Telah menerima hak akses hai djpb / belum	Counter (ada / tidak)	Laptop / pc (ada/ tidak) (dari kanpus djpb / tidak) (kalau dari kanpus djpb disebutkan serinya)	Printer (ada/ tidak) (dari kanpus djpb / tidak) (kalau dari kanpus djpb disebutkan serinya)	
Kanwil												
KPPN												
KPPN												

URAIKAN:

- Hasil evaluasi implementasi, berupa:
 - Positif / manfaat nya
 - Negatifnya / kendala / hambatan / permasalahan
 - Solusi yang diambil
- Masukan atas efektivitas implementasi KMK Nomor 834/KMK.01/2016 misalnya lokasi *co-location*, apakah dikurangi, tetap atau perlu ditambah.
- Usulan gagasan/ide baru mengenai perluasan jenis layanan yang dimungkinkan dalam *co-location*.
- Masukan mengenai materi-materi yang tepat dan dibutuhkan dalam rangka pembuatan sarana atau *tools* pelengkap penunjang CSO *co-location*.

L

CONTOH

LAPORAN IMPLEMENTASI CO-LOCATION
KANWIL DJPb PROV. DKI JAKARTA

Lokasi				Jenis layanan yang telah Di implementasi	Sdm (cso co-location)				Sarana & prasarana			Sosialisasi / pemberian Informasi kepada saker (/ sudah belum) / Waktu
TEMPAT (Sesuai KMK 834 Tahun 2016)	Implementasi / efektivitas	Host Co-location	Perlu ditambah / dikurangi / tetap		Berubah/ tidak	Nama/ Nip / Bidang/ Seksi	Pernah mengikuti diklat / belum / Waktu	Telah menerima hak akses hai djpb / belum	Counter (ada / tidak) / Lokasi Counter	Laptop / pc (ada/ tidak) (dari kanpus djpb / tidak) (kalau dari kanpus djpb disebutkan serinya)	Printer (ada/ tidak) (dari kanpus djpb / tidak) (kalau dari kanpus djpb disebutkan serinya)	
Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta	Telah Implementasi / Efektif	Kanwil DJKN Jakarta	Tetap	- Layanan informasi untuk lelang dan piutang - Layanan rekonsiliasi terpadu - Layanan Klinik Akuntansi	Tetap	- Vidya 123456789 - Putri 987654321	- Pernah (akhir Desember 2016) - Pernah (akhir Desember 2016)	- Menerima - Menerima	Ada / di Kanwil DJKN	Laptop / Dari Kantor Pusat DJPb / Lenovo Think Centre M73 / Kode: 310215645	Printer / Disediakan Kanwil DJKN	Sosialisasi / Bulan Januari 2018
KPPN Jakarta I	Telah Implementasi / Tidak Efektif	KPPN Jakarta I	Dikurangi / Tidak Perlu Implementasi	- Layanan registrasi hibah langsung dalam negeri - Layanan rekonsiliasi terpadu	Berubah	Semula: - Sigid 78956451 Bidang PPA 1 - Mulya 98465356 Bidang PPA 2 Menjadi - Suand 65893264 - Dono 36985462	- Pernah (akhir Desember 2016) - Pernah (akhir Desember 2016) - Belum - Belum	- Menerima - Menerima - Belum - Belum	Ada / di KPPN Jakarta I	PC / Disediakan KPPN Jakarta I	Multiprinter Scanner / Dari Kantor Pusat DJPb / Printer Laserjet Pro / Kode:31004	Sosialisasi Bulan Januari 2017
KPPN Jakarta II	Belum Implementasi	KPKNL Jakarta	Dikurangi / Tidak Perlu Implementasi	-	Tetap	- Yanu 8547964 - Imbi 9632587	- Belum - Belum	- Sudah - Sudah	Ada / di KPKNL Jakarta	PC / Disediakan KPKNL Jakarta	Tidak ada	Belum Sosialisasi
KPPN Jakarta VII	Tidak Implementasi karena Tidak Tercantum dalam KMK 834 Tahun 2016, namun akan efektif jika implementasi		Ditambah dalam lokasi co-location	-	Diusulkan	- Guna 9586623 - Awan 6985665	- Belum - Belum	- Belum - Belum	Di rencanakan di KPPN Jakarta VII	PC / Disediakan KPPN Jakarta VII	Printer / Disediakan KPPN Jakarta VII	Direncanakan diadakan sosialisasi